

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JL. CUT NYAK DHEN NO 01 TELP 0541 661049 FAX 0541 661033
TENG GARONG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja PD Dinas Sosial tahun 2021** dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 17 Maret 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. Didi Ranyadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640710 199301 1 001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	58
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan Kegiatan	61
BAB V PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2021 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang

sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2019 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2019 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 5 program yang meliputi : Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS; Program Penanganan Fakir Miskin; Program Pemberdayaan Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pelayanan Panti Asuhan dan panti Jompo. Dari 5 program tersebut Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre

Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan berkonflik dengan hukum. Sasaran kegiatan ini adalah anak dan perempuan. Khusus anak fokusnya tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga jika dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan maka sebenarnya dia merupakan korban dari sistem sosial yang tidak berjalan dengan semestinya. Dengan memperhatikan kecenderungan kasus mulai tahun 2015 hingga tahun 2018 maka diperkirakan tahun 2019 akan ada 45 kasus yang ditangani. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani sejumlah 52 kasus.

2) Kegiatan Pelayanan Sosial Harian (Day care service) bagi Tuna sosial di UPT Loka Bina Karya.

Kegiatan ini ditujukan kepada para penyandang Psikotik (ODGJ) terlantar yang belum ditemukan keberadaan keluarganya. Dinas Sosial hadir sebagai keluarga pengasuh bagi mereka dengan memberikan kebutuhan dasar selama masa transisi akibat kebijakan dihapusnya Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda. Dalam pelaksanaannya BPJS bagi ODGJ terlantar ini hanya dapat diterima selama 28 hari di Rumah sakit jiwa setelah itu harus dikembalikan dulu kepada keluarganya dan bias masuk ke RSJ lagi setelah 7-14 hari. Selama masa transisi tersebut Dinas Sosial memberikan

jaminan Hidup berupa tempat tinggal, makan minum dan pengawasan sehari hari hingga ditemukanya Keluarga dari Pasien atau dirujuk ke Panti Bina Laras jika sudah dianggap tenang dan mampu mengendalikan diri.

3) Kegiatan Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar

korban bencana untuk meringankan penderitaan mereka akibat bencana yang dialami dan diberikan selama masa tanggap darurat. Prosesnya adalah pada saat bencana terjadi para korban ini dievakuasi ketempat-tempat yang aman kemudian barulah diberikan bantuan untuk pemenuhan dasar. Penanganan korban bencana dikabupaten kutai kartanegara tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial melainkan dilakukan secara terkoordinasi dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah korban bencana yang berhasil diberikan bantuan selama masa tanggap darurat sejumlah 20.149 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan.

4) Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan ini merupakan bentuk pemberdayaan kepada Penyandang Disabilitas yang dilakukan melalui pemberian alat bantu aksesibilitas. Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 50 orang lanjut usia potensial, hingga saat ini masih dalam tahapan verifikasi berkas usulan dan proposal permohonan dari calon penerima program.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Kegiatan Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan ini merupakan sharing dana Pemerintah Kabupaten terhadap program pemerintah pusat yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah pusat dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk santunan bagi rumah tangga

penerima manfaat program, honorarium dan operasional petugas pendamping. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan di sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan jangkauan sosialisasi pelaksanaan program, dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2019 dengan jumlah SDM PKH sebanyak 104 orang yang tersebar di 18 Kecamatan. Pendanaan Kegiatan ini yang bersumber dari APBD merupakan amanah Menteri Sosial RI dimana setiap Kabupaten Kota yang memperoleh bantuan PKH wajib menyediakan dana Sharing sebesar 5% dari total seluruh bantuan PKH yang di terima Kabupaten tersebut. Dinas Sosial mencatat bahwa bantuan yang di terima masyarakat miskin di Kukar melalui program PKH senilai 50 Miliar sehingga minimal dana yang harus disediakan dalam upaya mendukung pendampingan program tersebut minimal 2,5 Miliar per tahunnya, sehingga proses pendampingan dapat berjalan sesuai dengan standar pola pendampingan menurut Kementerian Sosial RI.

2. Kegiatan Penanganan Masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kegiatan ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup korban bencana alam maupun social selama masa tanggap darurat. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat yang dibutuhkan para korban selama 2 s/d 7 hari. Dalam pelaksanaanya di tahun 2019 stok bantuan yang tersedia di gudang bantuan Dinas Sosial dalam keadaan menipis akibat seringnya terjadi musibah bencana di wilayah kutai kartanegara selam 6 bulan terakhir sehingga sangat diperlukan tambahan pemenuhan kebutuhan stok bantuan bagi korban bencana baik alam maupun sosial.

3. Program Pemberdayaan Sosial

1) Kegiatan Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai.

Kegiatan ini merupakan proses pendampingan dan verifikasi penerima santunan veteran dan janda veteran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini tercatat ada sebanyak 128 Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan bulanan. hingga akhir bulan juni seluruh veteran dan janda veteran telah terverifikasi factual dan saat ini dalam proses penyaluran santunanya melalui BPKAD.

2) Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 18 lembaga kesejahteraan sosial yangb telah terdaftar dan target hingga akhir tahun ini adaalah sosialisasi terhadap seluruh LKSA yang ada diwilayah Kabupaten kukar agar segera memenuhi persyaratan resmi yang telah ditetapkan dan kedepanya dinas sosial memberikan bimbingan terkait pemenuhan akreditasi LKSA tersebut.

4. Program Penanganan Fakir Miskin

1) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Panagan Non Tunai (Rastra)

Kegiatan ini merupakan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada dikabupaten kutai kartanegara. pemerintah daerah menyediakan honorarium dan biaya operasional petugas pendamping dalam penyaluran beras sejahtera. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2019.

2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini bertujuan memberikan ketrampilan dan pemahaman dalam pengelolaan Data Kemiskinan bagi Puskesmas Desa maupun Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Kukar. Puskesmas diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial di Desa dan Kelurahan dalam menyelesaikan Permasalahan permasalahan sosial yang mungkin muncul ditengah masyarakat. Puskesmas juga akan dibekali kemampuan mengaplikasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menjadi alat pendataan bagi warga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum realisasi Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 berkisar diangka 30 % dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang melampaui target yang ditetapkan akibat ketersediaan anggaran kegiatan yang tidak sesuai rencana. Kekhawatiran terjadinya kegiatan terhutang seperti di tahun 2020 menjadikan para pelaksana kegiatan sangat berhati hati dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Harapanya kepastian ketersediaan anggaran segera disampaikan oleh instansi terkait, agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun penganggaran.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2019 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya. Hal ini menyebabkan proses perubahan

perilaku tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pemberian bantuan modal UEP tetap dilaksanakan sehingga masyarakat lebih mengenal Dinas Sosial sebagai instansi yang memberikan bantuan sosial. Jika potensi ini dikelola dengan baik dan diarahkan untuk program-program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan bantuan sosial, maka kemungkinan untuk menekan angka kemiskinan sampai pada titik paling rendah akan dapat terwujud.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra_PD;

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan program pelayanan setidaknya ada 2 (dua) instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta aturan perubahannya dan program prioritas nasional di bidang sosial yang harus dilaksanakan oleh daerah.

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*)

sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD Tahun 2019 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2019 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	
				5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		-															
1	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam kerangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	13,083,687,000	21.3%	2,785,589,953	100%	1,417,706,440	89.2%	1,265,028,369	89%	89.23%	31%	4,050,618,322	31%	31%
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	6000	35,000,000	2400	4,700,000	1200	4,200,000	1200	4,200,000	100%	100.00%	3600	8,900,000	60%	25%

2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, telpon dan internet	120	1,634,600,000	56	336,867,108	12	274,800,000	11	215,916,907	92%	78.57%	67	552,784,015	56%	34%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional yang dibayar / diperpanjang	220	159,000,000	101	50,170,200	44	25,000,000	28	13,368,000	64%	53.47%	129	63,538,200	59%	40%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1600	2,466,341,000	485	671,828,692	320	347,997,000	308	266,727,000	96%	76.65%	793	938,555,692	50%	38%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	75	405,000,000	30	45,830,000	15	30,000,000	15	29,970,000	100%	99.90%	45	75,800,000	60%	19%
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	225	692,806,000	117	117,876,900	45	65,350,000	45	65,035,830	100%	99.52%	162	182,912,730	72%	26%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	55	143,406,000	33	6,000,000	11	6,000,000	11	6,000,000	100%	100.00%	44	12,000,000	80%	8%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	40320	189,328,000	8670	52,770,000	8064	9,000,000	7850	8,822,000	97%	98.02%	16520	61,592,000	41%	33%
9	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	170	260,000,000	54	26,879,300	34	10,000,000	34	9,820,000	100%	98.20%	88	36,699,300	52%	14%
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	3855	335,000,000	1161	53,210,000	771	25,000,000	771	25,000,000	100%	100.00%	1932	78,210,000	50%	23%

11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat konsultasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	1750	2,524,210,000	1050	234,418,863	370	185,000,000	332	164,020,172	90%	88.66%	1382	398,439,035	79%	16%
12	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah Tenaga THL / non pns yang dibayar	2940	3,530,546,000	434	1,153,854,440	588	411,109,440	556	381,898,560	95%	92.89%	990	1,535,753,000	34%	43%
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	35	358,450,000	21	31,184,450	7	24,250,000	7	24,249,900	100%	100.00%	28	55,434,350	80%	15%
14	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip	3	350,000,000	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	100%	100.00%	1	50,000,000	33%	14%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	95%	91.85%				
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

2	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme, sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam kerangka pelayanan publik yang primas dan kondusifitas daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur (%)	100	2,721,565,000	11.6%	314,830,923	100%	1,390,902,660	99.0%	369,297,412	99.0%	26.55%	38.1%	2,065,354,824	38%	76%
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional	145	1,544,000,000	85	452,562,008	29	253,500,660	22	175,247,727	76%	69.13%	107	627,809,735	74%	41%	
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	75	1,177,565,000	13	30,915,900	15	42,790,000	10	24,581,650	67%	57.45%	23	55,497,550	31%	5%	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	6	650,000,000	0	-	2	650,000,000	2	649,522,789	100%	99.93%	2	649,522,789	33%	100%	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)	63	900,500,000	27	67,967,125	9	86,112,000	9	83,927,000	100%	97.46%	36	151,894,125	57%	17%	

	5	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	25	2,767,574,376	10	118,268,925	2	250,000,000	2	242,180,850	100%	96.87%	12	360,449,775	48%	13%
	6	Pameran Pembangunan Peringatan Peristiwa Merah Putih dan Pameran lainnya	jumlah kegiatan	10	2,100,000,000	2	147,000,000	1	73,500,000	1	73,180,850	100%	99.57%	3	220,180,850	30%	10%
	7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor	25	167,684,000	5	-	5	35,000,000	3	16,585,650	60%	47.39%	8	16,585,650	32%	10%
					2,721,565,000		314,830,923		1,390,902,660		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	78%	74.34%				
											Predikat kinerja	Tinggi	Sedang				
3	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme, sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam kerangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100%	300,000,000	0	-	100%	100,000,000	81.90%	81,895,900	82%	81.90%	82%	81,895,900	82%	27%

	17	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	60	300,000,000	0	-	20	100,000,000	20.00	81,895,900	100%	81.90%	20.00	81,895,900	33%	27%	
									100,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100%	81.90%					
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi					
4		Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme, sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam kerangka pelayanan publik yang primas dan kondusifitas daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	3,039,617,000	65.19%	1,981,397,650	100%	200,000,000	94%	191,539,300	94%	95.77%	33%	2,172,936,950	33%	71%
	23	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen	25	691,450,000	4	91,945,000	7	200,000,000	7	191,539,300	100%	95.77%	11	283,484,300	44%	41%	
					691,450,000		91,945,000		200,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100%	95.77%					
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

5	Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang memerlukan penanganan x 100%	54	8,834,625,577	22.43%	1,981,397,650	100%	1,880,000,000	57.48%	1,080,530,904	31%	57.48%	54%	3,061,928,554	35%	35%
	1	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial (orang)	270	2,164,464,177	144	666,850,200	50	350,000,000	45	306,360,700	90%	87.53%	189	973,210,900	70%	45%
	2	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial (orang)	120	450,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
	3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (Stimulan)	Jumlah anak terlantar peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (anak)	20	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
	4	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	150	300,000,000	50	-	50	100,000,000	0	55,289,400	0%	55.29%	50	55,289,400	33%	18%

5	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis - kusta,tb paru.)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	155	510,000,000	45	197,570,450	76	335,000,000	0	-	0%	0.00%	45	197,570,450	29%	39%
6	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan (anak)	180	1,052,161,400	90	401,056,600	40	200,000,000	40	185,231,600	100%	92.62%	130	586,288,200	72%	56%
7	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang cacat dan eks trauma penerima disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis (orang)	180	485,000,000	50	102,257,400	21	100,000,000	12	98,290,154	57%	98.29%	62	200,547,554	34%	41%
8	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Jumlah Keluarga yang memperoleh penyuluhan dan bantuan	60	125,000,000	0	-	60	125,000,000	16	27,086,000	27%	21.67%	16	27,086,000	27%	22%
9	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)-fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	50	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
10	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Jumlah peserta rehabilitasi vokasional (Orang)	70	450,000,000	30	150,000,000	10	100,000,000	10	80,236,600	100%	80.24%	40	230,236,600	57%	51%
11	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK)	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	265	718,000,000	35	51,995,000	80	220,000,000	44	151,545,050	55%	68.88%	79	203,540,050	30%	28%

		Tenggarong															
12		Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	700	1,280,000,000	689	411,668,000	150	250,000,000	108	176,491,400	72%	70.60%	797	588,159,400	114%	46%
13		Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif)	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	50	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
14		Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	100	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
15		Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	55	300,000,000	0	-	15	100,000,000	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
16		Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	200	200,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0.00%	0	-	0%	0%
									1,880,000,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	31%	35.94%			
												Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

6	Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir Miskin yang tertangani dibagi total fakir miskin sesuai DT-PFM	80%	4,524,861,625	4.70%	212,811,600	25%	1,294,861,725	77.99%	1,009,846,735	78.0%	77.99%	27.02%	1,222,658,335	34%	27%
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	6	550,000,000	0	-	2	150,000,000	2	64,977,800	100%	43.32%	2.00	64,977,800	33%	12%
	2	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	60	1,000,000,000	24	212,811,600	12	150,000,000	12	79,702,200	100%	53.13%	36.00	292,513,800	60%	29%
	3	Operasional Puskesmas Kelurahan	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	132	1,802,175,000	0	-	44	602,175,100	44	550,072,600	100%	91.35%	44.00	550,072,600	33%	31%
	4	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial	Jumlah Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bimbingan teknis	1011	1,172,686,625	0	-	711	392,686,625	711	315,094,135	100%	80.24%	711.00	315,094,135	70%	27%
					4,524,861,625		212,811,600		1,294,861,725		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100%	67.01%				
											Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sedang				

7	Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100%	3,928,300,000	28.92%	1,135,883,650	100%	867,846,000	97.50%	389,395,692	98%	44.87%	38.83%	1,525,279,342	39%	39%
	1	Pelatihan Keterampilan usaha Ekonomi Produktif gbagi Wanita Rawan Sosial ekonomi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	151	375,000,000	1	89,083,600	50	75,000,000	50	74,817,592	100%	99.76%	51	163,901,192	34%	44%
	2	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda vetaran penerima santunan (orang)	830	903,300,000	582	468,283,400	180	125,000,000	180	124,999,600	100%	100.00%	762	593,283,000	92%	66%
	3	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK yang menerima pembinaan	110	1,000,000,000	54	206,983,400	21	317,846,000	21	299,703,000	100%	94.29%	75	506,686,400	68%	51%
	4	Fasilitasi pelayanan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah LKSA yang memperoleh fasilitasi	74	1,050,000,000	42	371,533,250	14	150,000,000	14	149,877,800	100%	99.92%	56	521,411,050	76%	50%

		5	Fasilitasi pengembangan PSKS Kelembagaan Lainnya	Jumlah PSKS Kelembagaan	5	600,000,000	0	-	1	200,000,000	1	196,758,250	100%	98.38%	1	196,758,250	20%	33%
						3,928,300,000		1,135,883,650		867,846,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100%	98.49%				
												Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
8	Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	13,637,947,500	49.59%	6,763,489,098	100%	4,524,000,000	89.52%	576,853,600	90%	12.75%	62.34%	7,340,342,698	62%	54%
		1	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	500	1,700,000,000	36	1,214,314,870	104	1,424,000,000	104	1,391,312,839	100%	97.70%	140	2,605,627,709	28%	153%
		2	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	330456	8,562,947,500	23443	4,421,894,083	23443	2,200,000,000	23443	1,807,290,746	100%	82.15%	46886	6,229,184,829	14%	73%
		4	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	31485	2,775,000,000	100	1,127,280,145	17890	700,000,000	17890	676,528,100	100%	96.65%	17990	1,803,808,245	57%	65%

	5	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas TAGANA	110	300,000,000	0	-	30	100,000,000	30	90,529,600	100%	90.53%	30	90,529,600	27%	30%
	6	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	3	300,000,000	0	-	1	100,000,000	1	84,105,600	100%	84.11%	1	84,105,600	33%	28%
					13,637,947,500		6,763,489,098		4,524,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	83.3%	75.19%				
											Predikat kinerja	Tinggi	Tinggi				
9	Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah	Pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100%	3,562,658,574	61%	2,187,810,570	100%	1,015,000,000	68.85%	698,874,067	69%	68.85%	81.03%	2,886,684,637	76%	81%
	1	Pelayanan anak Pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggara	Jumlah Anak yang memperoleh pelayanan dalam Panti	300	3,562,658,574	200	2,187,810,570	40	1,015,000,000	28	698,874,067	70%	68.85%	228	2,886,684,637	76%	81%
					3,562,658,574		2,187,810,570		1,015,000,000			70%	68.85%				
											Predikat kinerja	Sedang	Sedang				
RATA RATA CAPAIAN PROGRAM												84.16%	76.59%				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 adalah tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial
Tahun 2019

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA			KETETERANGAN
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100%	28031	orang	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	28031	orang		
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu anggaran ----- x 100%	1244	jiwa	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	1244	jiwa		
		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x 100%	21	unit	1.46%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
				Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	646	orang		
65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ----- x 100%	46	orang	95.83%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	48	orang				
66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ----- x 100%	606	orang	2.16%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	28031	orang				

Berdasarkan Lampiran III.3 Format Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial Kabupaten, terdapat 3 indikator kunci yang meliputi :

- 1) IKK Nomor 62 : Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).capaian Indikator Kinerja Kunci ini diukur melalui data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang memperoleh pemenuhan kebutuhan Dasar.
- 2) IKK Nomor 63 : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten. Tingkat capaian urusan ini diukur melalui Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan BPBD memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana baik alam maupun sosial selama masa tanggap darurat.
- 3) IKK Nomor 64 : Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng. Indicator kinerja ini terukur melalui jumlah Rumah Tinggal sementara bagi pemerlu layanan diantaranya, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), Day care service melalui UPT. Loka Bina Karya, Panti Sosial Asuhan Anak dan 18 unit Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) IKK Nomor 65 : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga. Indikator kinerja ini dicapai melalui kegiatan Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial serta Pelayanan Sosial Harian melalui UPT. Loka Bina Karya.
- 5) IKK Nomor 66 : Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan. Capaian pada indikator kinerja ini diukur melalui jumlah Tenaga Kerja Sosial diantaranya : Pekerja Sosial, Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator Tekhnis BPNT, Taruna Siaga Bencana, Penyuluh Sosial Masyarakat, dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM). Hanya saja perhitungan PMKS yang memperoleh pembinaan yang terdata oleh Dinas Sosial adalah Keluarga Penerima PKH.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara**

IKK	Indikator Kinerja	Target Renstra_PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
* Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	2 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
* Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	3 Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	1.5%	1.5%-	1.5%	1.5%	1.46%	1.5%	1.5%	1.5%	Belum terbit penetapan standar Nasional
* Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100%	100%	100%	100%	95.83%	100%	100%	100%	
Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	5 Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	Belum terbit penetapan standar Nasional

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial.

Sarana sosial yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara ketersediaan sarana sosial mulai tahun 2017 terdapat 15 buah, yang terdiri dari panti asuhan dan panti rehabilitasi. Angka ini pada tahun 2018 bertambah menjadi sejumlah 18 buah, yang terdiri dari Panti Sosial Asuhan Anak yang dikelola oleh swasta sebanyak 17 buah dan 1 buah Panti Sosial Asuhan Anak yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial. Keberadaan sarana sosial ini mendukung pola penanganan masalah sosial yang dikonsentrasikan dalam sebuah lembaga pelayanan. Kemudian pada tahun 2016-2018 sarana sosial yang ada berjumlah 18 buah.

Sarana sosial ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada PMKS melalui pendekatan kelembagaan. Namun demikian pendekatan ini untuk masa mendatang tidak lagi menjadi titik berat pelayanan sehubungan dengan adanya kebijakan pelayanan yang berpusat pada komunitas (*community based services*).

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Angka ini dihitung dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ditangani, baik melalui pola bimbingan sosial dan pemberian bantuan sosial. Pada tahun 2017 sejumlah 40,92% PMKS menerima pelayanan, angka ini meningkat menjadi 41,16% pada tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil dilayani oleh Dinas Sosial. Namun demikian bila dibandingkan dengan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dimana

ditargetkan penanganan PMKS sebesar 80%, maka capaian kinerja tersebut masih belum tercapai.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local. b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data. c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. d. Tingkta akurasi data yang masih rendah. e. Akses internet yang belum tersedia baik dibeberapa wilayah.
Bantuan stimulan bagi fakir miskin dan pendampingnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampingnya bagi fakir miskin belum tersedia anggarnya. b. Belum tersedia tenaga fungsional pendamping sosial.
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH d. Belum tersedia pekerja sosial fungsional

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat	a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam kondisi rusak.
Aspek Kajian	Permasalahan
Pelayanan sosial anak terlantar diluar panti	a. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan trauma	a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas
Pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPT	a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Jenis PSKS yang ada sangat terbatas b. Kurang intensifnya pembinaan terhadap TKSM

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpadu yang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan.
2. kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
3. kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa terhadap permasalahan dan factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel ;

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten			
	Program : Penanganan Fakir Miskin	Akurasi Basis Data Terpadu yang masih rendah Karen proses verivali sedang berjalan	Luas wilayah, banyaknya data yang harus diverivali,jaringan internet, SDM verivali data	Adanya dukungan program dari Kemensos dan dukungan KDH dalam proses verivali data.
	Program : Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedianya panti panti rehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Minimnya program komplementaritas bagi penerima manfaat Program Pusat	Transisi menuju bantuan non tunai sering terkendala system perbangkan	Pendampingan mulai intensif dilaksanakan dan sekaligus dalam rangka mensosialisasikan rencana pemenuhan program komplementaritas
	Program: Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya proses pemberdayaan PSKS	Kekosongan Pejabat pemangku	Adanya pendamping program yang diluncurkan kementerian Sosial RI
	Program: Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Perubahan SPM	Tanggung jawab pengelolaan panti ada pada pemerintah provinsi	Dalam masa transisi kabupaten masih diperkenankan melakukan pelayanan

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan.

Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementerian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas Permensos Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019. Adapun program yang dipandang penting dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

Program ini menitik beratkan sasaranya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga

miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompok rentan

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanggulangan Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan Kemntrian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

4. Program Penanganan fakir Miskin

Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Indikator kinerja program yang menjadi sasaran adalah berkurangnya keluarga miskin dan kelompok rentan yang berkurang beban pengeluarannya melalui keuangan inklusi, keluarga miskin yang meningkat produktivitas sosial ekonominya, serta meningkatnya kualitas lingkungan rumah tinggalnya.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

Tantangan yang dihadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional.

Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial.

Dengan demikian tentunya dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pemenuhan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya akan cenderung besar. Hal ini diperkuat dengan rasio rata-rata pertumbuhan serapan anggaran selama 5 tahun sebesar 35,27%, yang artinya realisasi serapan anggaran tiap tahun selalu meningkat.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial, ditetapkan melalui serangkaian kebijakan dan program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gerbang Raja. Adapun kebijakan dan program tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Program ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki daya atau kemampuan sekecil apapun. Permasalahan kesejahteraan sosial yang mereka alami disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan daya atau kemampuan yang mereka miliki karena berbagai penyebab atau keterbatasan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan yang berarti memperkuat daya atau kapasitas yang mereka miliki, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menolong mereka agar mampu menolong dirinya sendiri mengatasi permasalahan sosialnya.

- b. Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa dewasa.

- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- d. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

2. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas :

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan

- c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial
- d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2020 serta prospek tahun 2019 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 di tetapkan sebagai berikut :

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021

Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Non Urusan					3,564,140,660	Non Urusan					3,564,140,660	
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkntoran		100	%	1,452,040,000	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkntoran		100	%	1,452,040,000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet (rek/bln)	SKPD	12	bulan	240,840,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet (rek/bln)	SKPD	12	bulan	240,840,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang (unit)	SKPD	50	Unit	27,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang (unit)	SKPD	50	Unit	27,000,000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (OB)	SKPD	12	bulan	-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (OB)	SKPD	12	bulan	-	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	SKPD	85	Jenis	85,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	SKPD	85	Jenis	85,000,000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (jenis)	SKPD	10	Jenis	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (jenis)	SKPD	10	Jenis	30,000,000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (jenis)	SKPD	20	Jenis	12,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (jenis)	SKPD	20	Jenis	12,000,000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (eksemplar)	SKPD	1800	eksemplar	9,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (eksemplar)	SKPD	1800	eksemplar	9,000,000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (jenis)	SKPD	20	Jenis	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (jenis)	SKPD	20	Jenis	15,000,000	

9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	SKPD	500	porsi	40,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	SKPD	500	porsi	40,000,000	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (OH)	SKPD	200	OH	185,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (OH)	SKPD	200	OH	185,000,000	
11	Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar (OB)	SKPD	12	Bulan	639,000,000	Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar (OB)	SKPD	12	Bulan	639,000,000	
12	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Jenis)	SKPD	40	Jenis	65,000,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Jenis)	SKPD	40	Jenis	65,000,000	
13	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat (buah)	SKPD	700	buah	4,200,000	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat (buah)	SKPD	700	buah	4,200,000	
14	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang tertata	SKPD	1000	arsip	100,000,000	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang tertata	SKPD	1000	arsip	100,000,000	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik		90	%	1,009,100,660	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik		90	%	1,009,100,660	
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	Tengg arong	5	Unit	30,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	Tengg arong	5	Unit	30,000,000	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	SKPD	60	Unit	240,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	SKPD	60	Unit	240,000,000	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	SKPD	10	Jenis	50,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	SKPD	10	Jenis	50,000,000	
4	Lanjutan Pembangunan Panti Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Panti Sosial Penyandang Disabilitas yang selesai dibangun (unit)	Tengg arong	0	Unit	-	Lanjutan Pembangunan Panti Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Panti Sosial Penyandang Disabilitas yang selesai dibangun (unit)	Tengg arong	0	Unit	-	
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	Tengg arong	5	Unit	50,000,000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	Tengg arong	5	Unit	50,000,000	

6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)		1	Unit	279,100,660	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)		1	Unit	279,100,660	Pemenuhan SPM (Kendaraan Operasional Khusus Layanan Kedaruratan PMKS angkutan ODGJ Terlantar)
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)		10	Jenis	77,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)		10	Jenis	77,000,000	
8	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	Tengg arong	1	bangunan	150,000,000	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	Tengg arong	1	bangunan	150,000,000	
9	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Jumlah peringatan hari hari besar nasional (kegiatan)	Sanga Sanga	1	Kegiatan	85,000,000	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Jumlah peringatan hari hari besar nasional (kegiatan)	Sanga Sanga	1	Kegiatan	85,000,000	
10	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (m2)	Sanga Sanga	10	bulan	48,000,000	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (m2)	Sanga Sanga	10	bulan	48,000,000	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin		0	surat	220,000,000	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin		0	surat	220,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah penerima perlengkapan pakaian dinas 100 stel	SKPD	220	stel	220,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah penerima perlengkapan pakaian dinas 100 stel	SKPD	220	stel	220,000,000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	rata-rata nilai kinerja SKP		86	nilai	180,000,000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	rata-rata nilai kinerja SKP		86	nilai	180,000,000	
1	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional (orang)	SKPD	12	orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional (orang)	SKPD	12	orang	-	

2	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	SKPD	8	orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	SKPD	8	orang	-	
3	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	Tenggarong	20	orang	100,000,000	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	Tenggarong	20	orang	100,000,000	
4	Fasilitasi Penyusunan Anjab dan ABK Pegawai	Jumlah Dokumen	SKPD	2	dokumen	80,000,000	Fasilitasi Penyusunan Anjab dan ABK Pegawai	Jumlah Dokumen	SKPD	2	dokumen	80,000,000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi Renstra dan Renja		100	%	703,000,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi Renstra dan Renja		100	%	703,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian	SKPD	8	dokumen	200,000,000	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian	SKPD	8	dokumen	200,000,000	
2	Pengelolaan Data Kinerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Data pemerlu pelayanan dan penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial 18 kecamatan	SKPD	4	dokumen	-	Pengelolaan Data Kinerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Data pemerlu pelayanan dan penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial 18 kecamatan	SKPD	4	dokumen	-	
3	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	Jumlah Dokumen	SKPD	1	dokumen	80,000,000	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	Jumlah Dokumen	SKPD	1	dokumen	80,000,000	
		Ketepatan pelaporan keuangan dan aset		100	%	-		Ketepatan pelaporan keuangan dan aset		100	%	-	
1	Pengelolaan Arsip Internal Pemerintah Daerah	jumlah arsip Keuangan perangkat daerah yang dikelola	SKPD	5	Jenis	-	Pengelolaan Arsip Internal Pemerintah Daerah	jumlah arsip Keuangan perangkat daerah yang dikelola	SKPD	5	Jenis	-	
		Prosentase penurunan temuan audit		100	%			Prosentase penurunan temuan audit		100	%		
1	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah dokumen pengendalian	SKPD	0	dokumen	-	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah dokumen pengendalian	SKPD	0	dokumen	-	
2	Inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang terinventarisir	SKPD	1	dokumen	50,000,000	Inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang terinventarisir	SKPD	1	dokumen	50,000,000	

3	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	SKPD	12	dokumen	252,000,000	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	SKPD	12	dokumen	252,000,000	
4	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD	2	dokumen	121,000,000	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD	2	dokumen	121,000,000	
						9,125,000,000							
						9,125,000,000							
	Program Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100	%	1,015,000,000	Program Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100	%	1,015,000,000	
1	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong penerima pelayanan sosial (anak)	Tenggarong	40	orang	1,015,000,000	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong penerima pelayanan sosial (anak)	Tenggarong	40	orang	1,015,000,000	
	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani		100	%	2,270,000,000	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani		100	%	2,270,000,000	
1	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial (orang)	Tenggarong	70	orang	350,000,000	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial (orang)	Tenggarong	70	orang	350,000,000	
2	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial (orang)	Kab. Kukar	50	orang	150,000,000	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial (orang)	Kab. Kukar	50	orang	150,000,000	Pemenuhan SPM
3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (Stimulan)	Jumlah anak terlantar peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (anak)	Kab. Kukar	10	orang	-	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (Stimulan)	Jumlah anak terlantar peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (anak)	Kab. Kukar	10	orang	-	

4	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	
5	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis - kusta,tb paru,)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	Kab. Kukar	50	orang	150,000,000	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis - kusta,tb paru,)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	Kab. Kukar	50	orang	150,000,000	Pemenuhan SPM
6	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan (anak)	Kab. Kukar	40	orang	200,000,000	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan (anak)	Kab. Kukar	40	orang	200,000,000	
7	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis (orang)	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis (orang)	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	Pemenuhan SPM
8	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	Kab. Kukar	25	orang	100,000,000	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	Kab. Kukar	25	orang	100,000,000	Pemenuhan SPM
9	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Jumlah peserta rehabilitasi vokasional (Orang)	Tenggarong	20	orang	100,000,000	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Jumlah peserta rehabilitasi vokasional (Orang)	Tenggarong	20	orang	100,000,000	Pemenuhan SPM
10	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	Tenggarong	80	orang	220,000,000	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	Tenggarong	80	orang	220,000,000	Pemenuhan SPM
11	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	Kab. Kukar	125	orang	250,000,000	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	Kab. Kukar	125	orang	250,000,000	Pemenuhan SPM

12	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	Kab. Kukar	25	orang	100,000,000	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	Kab. Kukar	25	orang	100,000,000	
13	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	
14	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	Tengg arong	20	orang	100,000,000	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	Tengg arong	20	orang	100,000,000	
	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Jumlah Keluarga dengan ABH yang terfasilitasi penguatannya	Kab. Kukar	50	KK	150,000,000	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Jumlah Keluarga dengan ABH yang terfasilitasi penguatannya	Kab. Kukar	50	KK	150,000,000	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		120	%	-		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		120	%	-	
15	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Kab. Kukar	100	orang	100,000,000	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Kab. Kukar	100	orang	100,000,000	
	Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan Fakir Miskin/Orang Tidak Mampu yang tertangani		90	%	2,105,000,000	Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan Fakir Miskin/Orang Tidak Mampu yang tertangani		90	%	2,105,000,000	
1	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (KUBE)	Jumlah Kelompok Fakir Miskin yang memperoleh bantuan Stimulan	Kab. Kukar	50	KK	150,000,000	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (KUBE)	Jumlah Kelompok Fakir Miskin yang memperoleh bantuan Stimulan	Kab. Kukar	50	KK	150,000,000	
2	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	Kab. Kukar	24000	keluarga	600,000,000	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	Kab. Kukar	24000	keluarga	600,000,000	

3	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kab. Kukar	3	dokumen	500.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kab. Kukar	3	dokumen	500.000.000	Pemenuhan SPM
4	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah petugas pengelola data yang mampu mengelola data (Operator SIKS-NG desa dan Kelurahan)	Kab. Kukar	340	orang	340,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah petugas pengelola data yang mampu mengelola data (Operator SIKS-NG desa dan Kelurahan)	Kab. Kukar	340	orang	340,000,000	Pemenuhan SPM
5	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (Rakor Kesos)	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	Kab. Kukar	1	dokumen	65,000,000	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (Rakor Kesos)	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	Kab. Kukar	1	dokumen	65,000,000	
6	fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	Jumlah Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kab. Kukar	25	dokumen	100,000,000	fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	Jumlah Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kab. Kukar	25	dokumen	100,000,000	
7	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	Tenggarong	12	bulan	100,000,000	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	Tenggarong	12	bulan	100,000,000	Pemenuhan SPM
3	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Keluarga Muda Mandiri (pelatihan dan bantuan KUBE)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi KMM (KK)	Kab. Kukar	50	orang	125,000,000	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Keluarga Muda Mandiri (pelatihan dan bantuan KUBE)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi KMM (KK)	Kab. Kukar	50	orang	125,000,000	
2	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (pelatihan dan bantuan)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	Kab. Kukar	50	orang	125,000,000	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (pelatihan dan bantuan)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	Kab. Kukar	50	orang	125,000,000	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100	%	2,150,000,000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100	%	2,150,000,000	

1	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	Kab. Kukar		orang	-	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	Kab. Kukar		orang	-	
		Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan		250	kali	850,000,000		Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan		250	kali	850,000,000	
2	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Jumlah Kelompok KPM PKH yang mengikuti P2K2	Kab. Kukar	30	Kelompok	150,000,000	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Jumlah Kelompok KPM PKH yang mengikuti P2K2	Kab. Kukar	30	Kelompok	150,000,000	
3	Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan UEP (usaha ekonomi Produktif)	Kab. Kukar	100	KK	200,000,000	Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan UEP (usaha ekonomi Produktif)	Kab. Kukar	100	KK	200,000,000	
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100	%	-		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100	%	-	
4	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Kab. Kukar	3000	jiwa	600,000,000	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Kab. Kukar	3000	jiwa	600,000,000	Pemenuhan SPM
5	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas TAGANA	Kab. Kukar	40	orang	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas TAGANA	Kab. Kukar	40	orang	150,000,000	Pemenuhan SPM
6	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kukar	1	desa	200,000,000	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kukar	1	desa	200,000,000	Pemenuhan SPM
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		20	%	1,585,000,000	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		20	%	1,585,000,000	
		Presentase Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan		100	%	-		Presentase Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan		100	%	-	

1	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda veteran penerima santunan (orang)	Kab. Kukar	125	orang	125,000,000	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda veteran penerima santunan (orang)	Kab. Kukar	125	orang	125,000,000	
		Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial		100	%	-		Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial		100	%	-	
2	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah peserta Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial (SMP)	Kab. Kukar	50	Peserta	100,000,000	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah peserta Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial (SMP)	Kab. Kukar	50	Peserta	100,000,000	
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		35	%	-		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		35	%	-	
3	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang memperoleh Pelatihan Manajemen pengelolaan LKSA	Kab. Kukar	25	Lemba ga	200,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang memperoleh Pelatihan Manajemen pengelolaan LKSA	Kab. Kukar	25	Lemba ga	200,000,000	
4	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	jumlah Lembaga yang memperoleh pembinaan PUB dan UGB	Kab. Kukar	30	Lemba ga	60,000,000	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	jumlah Lembaga yang memperoleh pembinaan PUB dan UGB	Kab. Kukar	30	Lemba ga	60,000,000	
5	Fasilitasi pengembangan PSKS Kelembagaan Lainnya.	Jumlah PSKS Kelembagaan lainya (Karang taruna, LK3, Orsos dan yayasan terdaftar) yang memperoleh fasilitas pengembangan	Kab. Kukar	40	Lemba ga	200,000,000	Fasilitasi pengembangan PSKS Kelembagaan Lainnya.	Jumlah PSKS Kelembagaan lainya (Karang taruna, LK3, Orsos dan yayasan terdaftar) yang memperoleh fasilitas pengembangan	Kab. Kukar	40	Lemba ga	200,000,000	Pemenu han SPM

		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		20	%	-		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		20	%	-	
6	Fasilitasi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan	Jumlah PSKS perorangan yang difasilitasi dibagi jumlah PSKS perorangan yang ada (PSM, Peksos, TKSK)	Kab. Kukar	30	orang	300,000,000	Fasilitasi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan	Jumlah PSKS perorangan yang difasilitasi dibagi jumlah PSKS perorangan yang ada (PSM, Peksos, TKSK)	Kab. Kukar	30	orang	300,000,000	Pemenuhan SPM
7	Operasional Puskessos Kelurahan	Jumlah Puskessos di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	Kab. Kukar	50	kelurahan	600,000,000	Operasional Puskessos Kelurahan	Jumlah Puskessos di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	Kab. Kukar	50	kelurahan	600,000,000	Pemenuhan SPM
TOTAL						12,689,140,660							12,689,140,660

3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 meliputi 5 (lima) program generik yang dilaksanakan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan, dan 5 (lima) program non generik yang dilaksanakan dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran/ Volume		Keterangan
	Non Urusan					
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantor	100	%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet (rek/bln)	12	bulan	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang (unit)	50	Unit	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan (OB)	12	bulan	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	85	Jenis	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan (jenis)	10	Jenis	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (jenis)	20	Jenis	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan (eksemplar)	1800	eksemplar	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor (jenis)	20	Jenis	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	500	porsi	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (OH)	200	OH	
11	Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran	SKPD	Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar (OB)	12	Bulan	
12	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Jenis)	40	Jenis	
13	Penyediaan Jasa surat Menyurat	SKPD	Jumlah Surat (buah)	700	buah	
14	Penataan Arsip Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Arsip yang tertata	1000	arsip	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	90	%	

1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	5	Unit	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	60	Unit	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	10	Jenis	
4	Lanjutan Pembangunan Panti Sosial Penyandang Disabilitas	Tenggarong	Jumlah Panti Sosial Penyandang Disabilitas yang selesai dibangun (unit)	0	Unit	
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	5	Unit	
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	1	Unit	Pemenuhan SPM (Kendaraan Operasional Khusus Layanan Kedaruratan PMKS angkutan ODGJ Terlantar)
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)	10	Jenis	
8	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Tenggarong	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	1	bangunan	
9	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Sanga Sanga	Jumlah peringatan hari hari besar nasional (kegiatan)	1	Kegiatan	
10	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Sanga Sanga	Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (m2)	10	bulan	
	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase penurunan pelanggaran disiplin	0	surat	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah penerima perlengkapan pakaian dinas 100 stel	220	stel	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		rata-rata nilai kinerja SKP	86	nilai	
1	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial	SKPD	Jumlah SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional (orang)	12	orang	
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	SKPD	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	8	orang	
3	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	20	orang	
4	Fasilitasi Penyusunan Anjab dan ABK Pegawai	SKPD	Jumlah Dokumen	2	dokumen	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat konsistensi Renstra dan Renja	100	%	
1	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian	8	dokumen	
2	Pengelolaan Data Kinerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	SKPD	Data pemerlu pelayanan dan penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial 18 kecamatan	4	dokumen	

3	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	SKPD	Jumlah Dokumen	1	dokumen	
			Ketepatan pelaporan keuangan dan aset	100	%	
1	Pengelolaan Arsip Internal Pemerintah Daerah	SKPD	jumlah arsip Keuangan perangkat daerah yang dikelola	5	Jenis	
			Prosentase penurunan temuan audit	100	%	
2	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian	0	dokumen	
4	Inventarisasi BMD	SKPD	Jumlah BMD yang terinventarisir	1	dokumen	
2	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	12	dokumen	
3	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	dokumen	
	Program Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo		Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	%	
1	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggara	Tenggara	Jumlah anak asuh UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggara penerima pelayanan sosial (anak)	40	orang	
	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS		Persentase PMKS yang tertangani	100	%	
1	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Tenggara	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial (orang)	70	orang	
2	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Kab. Kukar	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial (orang)	50	orang	Pemenuhan SPM
3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (Stimulan)	Kab. Kukar	Jumlah anak terlantar peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (anak)	10	orang	
4	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Kab. Kukar	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	50	orang	
5	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)	Kab. Kukar	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	50	orang	Pemenuhan SPM
6	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	Kab. Kukar	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan (anak)	40	orang	

7	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	Kab. Kukar	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis (orang)	50	orang	Pemenuhan SPM
8	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Kab. Kukar	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	25	orang	Pemenuhan SPM
9	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Tenggarong	Jumlah peserta rehabilitasi vokasional (Orang)	20	orang	Pemenuhan SPM
10	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	Tenggarong	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	80	orang	Pemenuhan SPM
11	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Kab. Kukar	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, traficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	125	orang	Pemenuhan SPM
12	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif)	Kab. Kukar	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	25	orang	
13	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Kab. Kukar	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	50	orang	
14	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Tenggarong	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	20	orang	
15	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga dengan ABH yang terfasilitasi penguatannya	50	KK	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	120	%	
15	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Kab. Kukar	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	100	orang	
	Program Penanganan Fakir Miskin		Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	90	%	
1	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (KUBE)	Kab. Kukar	Jumlah Kelompok Fakir Miskin yang memperoleh bantuan Stimulan	50	KK	
2	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Kab. Kukar	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	24000	keluarga	
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	3	dokumen	

4	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kab. Kukar	Jumlah petugas pengelola data yang mampu mengelola data (Operator SIKS-NG desa dan Kelurahan)	340	orang	Pemenuhan SPM
5	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (Rakor Kesos)	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	1	dokumen	
6	fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	Kab. Kukar	Jumlah Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	25	dokumen	
7	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Tenggarong	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	12	bulan	Pemenuhan SPM
3	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Keluarga Muda Mandiri (pelatihan dan bantuan KUBE)	Kab. Kukar	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi KMM (KK)	50	orang	
2	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (pelatihan dan bantuan)	Kab. Kukar	Jumlah peserta pelatihan keterampilan wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	50	orang	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	%	
1	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Kab. Kukar	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan		orang	
			Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan	250	kali	
2	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Kab. Kukar	Jumlah Kelompok KPM PKH yang mengikuti P2K2	30	Kelompok	
3	Bantuan stimulan bagi KPM	Kab. Kukar	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan UEP (usaha ekonomi Produktif)	100	KK	
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	
4	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab. Kukar	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	3000	jiwa	Pemenuhan SPM
5	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Kab. Kukar	Jumlah peserta peningkatan kapasitas TAGANA	40	orang	Pemenuhan SPM
6	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Kab. Kukar	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	1	desa	Pemenuhan SPM
	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	20	%	

			Presentase Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan	100	%	
1	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah veteran dan janda veteran penerima santunan (orang)	125	orang	
			Presentase pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	100	%	
2	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Kukar	Jumlah peserta Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keberintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial (SMP)	50	Peserta	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	35	%	
3	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Kab. Kukar	Jumlah LKSA yang memperoleh Pelatihan Manajemen pengelolaan LKSA	25	Lembaga	
4	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	Kab. Kukar	jumlah Lembaga yang memperoleh pembinaan PUB dan UGB	30	Lembaga	
5	Fasilitasi pengembangan PSKS Kelembagaan Lainnya.	Kab. Kukar	Jumlah PSKS Kelembagaan lainnya (Karang taruna, LK3, Orsos dan yayasan terdaftar) yang memperoleh fasilitas pengembangan	40	Lembaga	Pemenuhan SPM
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	20	%	
6	Fasilitasi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan	Kab. Kukar	Jumlah PSKS perorangan yang difasilitasi dibagi jumlah PSKS perorangan yang ada (PSM, Peksos, TKSK)	30	orang	Pemenuhan SPM
7	Operasional Puskesmas Kelurahan	Kab. Kukar	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	50	kelurahan	Pemenuhan SPM

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat 2. Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan	1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan 2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran
2	Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendamping dan pembimbing LKS 2. Kerjasama dengan BBPPKS dalam pengembangan kapasitas SDM belum berjalan dengan baik		Menjadi faktor pemicu dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimantan Timur
Tahun 2014-2019

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dimensi kualitas hidup yang sangat luas sehingga perlu diturunkan secara lebih khusus untuk memudahkan penanganan	Tidak adanya informasi yang tegas tentang berapa kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten/Kota untuk mencapai target sasaran tersebut	
2	Meningkatkan potensi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Upaya peningkatan potensi sosial PMKS masih dipahami dengan sangat sederhana dan terbatas	PMKS sangat mengharapkan upaya pemberdayaan yang bersifat instan, bukan pemberdayaan yang sebenarnya merupakan proses yang cenderung panjang	Kebijakan Kepala Daerah untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi
3	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.PSKS terutama TKSM yang jumlahnya paling banyak, kondisinya banyak yang sdh tidak aktif lagi 2.TKSM yang ada sudah banyak yang memasuki usia lanjut 3.PSKS yang masih potensial jumlahnya sangat terbatas dan sebarannya cukup jauh	Pola pembinaan dan pemberian wewenang yng kurang jelas terutama bagi TKSM	Adanya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, memerlukan partisipasi aktif dari PSKS

4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur 2. Banyaknya aturan penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali membingungkan dalam pelaksanaannya 3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan SDM Aparatur yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya 2. Tidak tersedianya petunjuk teknis operasional yang jelas dan mudah dioperasikan 	Kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dengan memberikan <i>reward and punishment</i> yang jelas
---	---	---	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;

7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan

8. Kriteria SMART-C yaitu:

- a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f) *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN	
				2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 (Baik)	77 (Baik)
		Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan PMKS	Cakupan Penanganan PMKS	90 %	92%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya pengentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementrian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban mendukung kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh

pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapannya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berate sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.



- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
1. Pada tahun anggaran 2021 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 10 Program dengan 74 kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Keterampilan.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12,421,739,660,-
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2021 dan Perkiraan maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2021 dan
Perkiraan maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022		
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	0.	Non Urusan					3,564,140,660				3,564,140,660
	0.1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkntoran		100	%	1,452,040,000		100	%	1,452,040,000
1	0000.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet (rek/bln)	SKPD	12	bulan	240,840,000.00		12	bulan	240,840,000.00
2	0000.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang (unit)	SKPD	50	Unit	27,000,000.00		50	Unit	27,000,000.00
3	0000.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (OB)	SKPD	12	bulan	-		12	bulan	-
4	0000.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	SKPD	85	Jenis	85,000,000.00		85	Jenis	85,000,000.00
5	0000.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (jenis)	SKPD	10	Jenis	30,000,000.00		10	Jenis	30,000,000.00
6	0000.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (jenis)	SKPD	20	Jenis	12,000,000.00		20	Jenis	12,000,000.00
7	0000.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (eksemplar)	SKPD	1800	eksemplar	9,000,000.00		1800	eksemplar	9,000,000.00
8	0000.01.010	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (jenis)	SKPD	20	Jenis	15,000,000.00		20	Jenis	15,000,000.00
9	0000.01.011	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	SKPD	500	porsi	40,000,000.00		500	porsi	40,000,000.00

10	0000.01.012	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (OH)	SKPD	200	OH	185,000,000.00		200	OH	185,000,000.00
11	0000.01.013	Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar (OB)	SKPD	12	Bulan	639,000,000.00		12	Bulan	639,000,000.00
12	0000.01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Jenis)	SKPD	40	Jenis	65,000,000.00		40	Jenis	65,000,000.00
13	0000.01.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat (buah)	SKPD	700	buah	4,200,000.00		700	buah	4,200,000.00
14	0000.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang tertata	SKPD	1000	arsip	100,000,000.00		1000	arsip	100,000,000.00
	0.2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik		90	%	1,009,100,660		90	%	1,229,100,660
1	0000.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	Tenggarong	5	Unit	30,000,000		5	Unit	30,000,000
2	0000.02.003	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	SKPD	60	Unit	240,000,000		60	Unit	240,000,000
3	0000.02.005	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	SKPD	10	Jenis	50,000,000		10	Jenis	50,000,000
4	0000.02.006	Lanjutan Pembangunan Panti Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Panti Sosial Penyandang Disabilitas yang selesai dibangun (unit)	Tenggarong	0	Unit	-		0	Unit	-
5	0000.02.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	Tenggarong	5	Unit	50,000,000		5	Unit	50,000,000

6	0000.02.008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)		1	Unit	279,100,660	Pemenuhan SPM (Kendaraan Operasional Khusus Layanan Kedaruratan PMKS angkutan ODGJ Terlantar)	0	Unit	-
7	0000.02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)		10	Jenis	77,000,000		10	Jenis	77,000,000
8	0000.02.010	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	Tenggarong	1	bangunan	150,000,000	Permendagri 90 -2018	2	bangunan	649,100,660
9	0000.02.011	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Jumlah peringatan hari hari besar nasional (kegiatan)	Sanga Sanga	1	Kegiatan	85,000,000		1	Kegiatan	85,000,000
10	0000.02.012	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (m2)	Sanga Sanga	10	bulan	48,000,000		10	bulan	48,000,000
	0.3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin		0	surat	220,000,000		0	surat	-
1	0000.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah penerima perlengkapan pakaian dinas 100 stel	SKPD	220	stel	220,000,000		0	stel	-
	0.5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	rata-rata nilai kinerja SKP		86	nilai	180,000,000		86	nilai	180,000,000
1	0000.05.001	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional (orang)	SKPD	12	orang	-		12	orang	-
2	0000.05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	SKPD	8	orang	-		8	orang	-

3	0000.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	Tenggarong	20	orang	100,000,000		20	orang	100,000,000
4	0000.05.024	Fasilitasi Penyusunan Anjab dan ABK Pegawai	Jumlah Dokumen	SKPD	2	dokumen	80,000,000		2	dokumen	80,000,000
	0.6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi Renstra dan Renja		100	%	703,000,000		100	%	703,000,000
1	0000.06.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian	SKPD	8	dokumen	200,000,000		8	dokumen	200,000,000
2	0000.06.002	Pengelolaan Data Kinerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Data pemerlu pelayanan dan penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial 18 kecamatan	SKPD	4	dokumen	-		4	dokumen	-
3	0000.06.003	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	Jumlah Dokumen	SKPD	1	dokumen	80,000,000		1	dokumen	80,000,000
			Ketepatan pelaporan keuangan dan aset		100	%	-		100	%	-
1	0000.06.004	Pengelolaan Arsip Internal Pemerintah Daerah	jumlah arsip Keuangan perangkat daerah yang dikelola	SKPD	5	Jenis	-		5	Jenis	-
			Prosentase penurunan temuan audit		100	%			100	%	
2	0000.06.005	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah dokumen pengendalian	SKPD	0	dokumen	-		0	dokumen	-
4	0000.06.036	Inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang terinventarisir	SKPD	1	dokumen	50,000,000		1	dokumen	50,000,000
2	0000.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	SKPD	12	dokumen	252,000,000		12	dokumen	252,000,000

3	0000.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengleolaan Barang Milik Daerah	SKPD	2	dokumen	121,000,000		2	dokumen	121,000,000
	Wajib										
	Sosial						9,125,000,000				9,125,000,000
	1.6.19.	Program Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100	%	1,015,000,000		100	%	1,015,000,000
1	0106.19.001	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong penerima pelayanan sosial (anak)	Tenggarong	40	orang	1,015,000,000		40	orang	1,015,000,000
	1.6.27	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani		100	%	2,270,000,000		100	%	2,270,000,000
1	0106.27.001	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial (orang)	Tenggarong	70	orang	350,000,000		70	orang	350,000,000
2	0106.27.002	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial (orang)	Kab. Kukar	50	orang	150,000,000	Pemenuhan SPM	50	orang	150,000,000
3	0106.27.003	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (Stimulan)	Jumlah anak terlantar peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (anak)	Kab. Kukar	10	orang	-		10	orang	-

4	0106.27.004	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000		50	orang	100,000,000
5	0106.27.005	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	Kab. Kukar	50	orang	150,000,000	Pemenuhan SPM	50	orang	150,000,000
6	0106.27.006	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan (anak)	Kab. Kukar	40	orang	200,000,000		40	orang	200,000,000
7	0106.27.007	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis (orang)	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000	Pemenuhan SPM	50	orang	100,000,000
8	0106.27.008	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	Kab. Kukar	25	orang	100,000,000	Pemenuhan SPM	25	orang	100,000,000
9	0106.27.009	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Jumlah peserta rehabilitasi vokasional (Orang)	Tenggarong	20	orang	100,000,000	Pemenuhan SPM	20	orang	100,000,000
10	0106.27.010	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	Tenggarong	80	orang	220,000,000	Pemenuhan SPM	80	orang	220,000,000
11	0106.27.011	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, traficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	Kab. Kukar	125	orang	250,000,000	Pemenuhan SPM	125	orang	250,000,000

12	0106.27.012	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	Kab. Kukar	25	orang	100,000,000		25	orang	100,000,000
13	0106.27.013	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	Kab. Kukar	50	orang	100,000,000		50	orang	100,000,000
14	0106.27.014	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	Tenggarong	20	orang	100,000,000		20	orang	100,000,000
	0106.27.016	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Jumlah Keluarga dengan ABH yang terfasilitasi penguatannya	Kab. Kukar	50	KK	150,000,000		50	KK	150,000,000
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		120	%	-		120	%	-
15	0106.27.015	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Kab. Kukar	100	orang	100,000,000		100	orang	100,000,000
	1.6.28.	Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani		90	%	2,105,000,000		90	%	2,105,000,000
1	0106.28.001	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (KUBE)	Jumlah Kelompok Fakir Miskin yang memperoleh bantuan Stimulan	Kab. Kukar	50	KK	150,000,000		50	KK	150,000,000

2	0106.28.002	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	Kab. Kukar	24000	keluarga	600,000,000		24000	keluarga	600,000,000
3	0106.28.003	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kab. Kukar	3	dokumen	500.000.000	Pemenuhan SPM	3	dokumen	500.000.000
4	0106.28.004	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah petugas pengelola data yang mampu mengelola data (Operator SIKS-NG desa dan Kelurahan)	Kab. Kukar	340	orang	340,000,000	Pemenuhan SPM	340	orang	340,000,000
5	0106.28.005	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (Rakor Kesos)	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	Kab. Kukar	1	dokumen	65,000,000		1	dokumen	65,000,000
6	0106.28.006	fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	Jumlah Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kab. Kukar	25	dokumen	100,000,000		25	dokumen	100,000,000
7	0106.28.007	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	Tenggarong	12	bulan	100,000,000	Pemenuhan SPM	12	bulan	100,000,000
3	0106.28.010	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi produktif bagi Keluarga Muda Mandiri (pelatihan dan bantuan KUBE)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi KMM (KK)	Kab. Kukar	50	orang	125,000,000		50	orang	125,000,000

2	0106.28.011	Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (pelatihan dan bantuan)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	Kab. Kukar	50	orang	125,000,000		50	orang	125,000,000
	1.6.29.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100	%	2,150,000,000		100	%	2,150,000,000
1	0106.29.001	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	Kab. Kukar		orang	-			orang	-
			Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan		250	kali	850,000,000		250	kali	850,000,000
2	0106.29.002	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Jumlah Kelompok KPM PKH yang mengikuti P2K2	Kab. Kukar	30	Kelompok	150,000,000		30	Kelompok	150,000,000
3	0106.29.003	Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan UEP (usaha ekonomi Produktif)	Kab. Kukar	100	KK	200,000,000		100	KK	200,000,000
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100	%	-		100	%	-
4	0106.29.004	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Kab. Kukar	3000	jiwa	600,000,000	Pemenuhan SPM	3000	jiwa	600,000,000
5	0106.29.005	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas TAGANA	Kab. Kukar	40	orang	150,000,000	Pemenuhan SPM	40	orang	150,000,000
6	0106.29.006	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kukar	1	desa	200,000,000	Pemenuhan SPM	1	desa	200,000,000

	1.6.30.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		20	%	1,585,000,000		20	%	1,585,000,000
			Presentase Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan		100	%	-		100	%	-
1	0106.30.003	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda vetaran penerima santunan (orang)	Kab. Kukar	125	orang	125,000,000		125	orang	125,000,000
			Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial		100	%	-		100	%	-
2	0106.30.004	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah peserta Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial (SMP)	Kab. Kukar	50	Peserta	100,000,000		50	Peserta	100,000,000
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		35	%	-		35	%	-

3	0106.30.005	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang memperoleh Pelatihan Manajemen pengelolaan LKSA	Kab. Kukar	25	Lembaga	200,000,000		25	Lembaga	200,000,000
4	0106.30.007	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	jumlah Lembaga yang memperoleh pembinaan PUB dan UGB	Kab. Kukar	30	Lembaga	60,000,000		30	Lembaga	60,000,000
5	0106.30.008	Fasilitasi pengembangan PSKS Kelembagaan Lainnya.	Jumlah PSKS Kelembagaan lainnya (Karang taruna, LK3, Orsos dan yayasan terdaftar) yang memperoleh fasilitas pengembangan	Kab. Kukar	40	Lembaga	200,000,000	Pemenuhan SPM	40	Lembaga	200,000,000
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		20	%	-		20	%	-
6	0106.30.009	Fasilitasi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan	Jumlah PSKS perorangan yang difasilitasi dibagi jumlah PSKS perorangan yang ada (PSM, Peksos, TKSK)	Kab. Kukar	30	orang	300,000,000	Pemenuhan SPM	30	orang	300,000,000
7	0106.30.010	Operasional Puskesmas Kelurahan	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	Kab. Kukar	50	kelurahan	600,000,000	Pemenuhan SPM	50	kelurahan	600,000,000
TOTAL							12,689,140,660				12,689,140,660

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, proses penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
 1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
 2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kebutuhan saat ini adalah perlunya tersedia kendaraan khusus angkutan PMKS sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang Sosial.
 4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

- c. Rencana tindak lanjut ;
1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
 2. Optimalisasi Pemutakhiran DTKS.
 3. Penyediaan Kendaraan Khusus PMKS.
 4. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Renja PD tahun 2021 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 17 Maret 2020

Kepala Dinas Sosial



Ir. Didi Ramyadi, MM

NIP. 19640710 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 00.3/SK/Set.2/DS/III/2020

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
- PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan acuan dan rencana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai pada tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. Didi Kanyadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640710 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 00.2/SK/Set.2/DS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA PD)

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Januari 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara,


Ir. Didi Ranjadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640710 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
TANGGAL : 17 Januari 2020.
NOMOR : 002 / SK / SET .2 / DS / I / 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2021.

NO	TIM PENYUSUN RENJA 2021	JABATAN
1.	Kepala Dinas Sosial.	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Sosial.	Ketua
3.	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan.	Sekretaris
4.	Kanti Mulati.	Anggota
5.	Hairil Azuar.	Anggota
6.	Novitasari.	Anggota
7.	Juanda.	Anggota
8.	Habibi Hidayat.	Anggota

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

Ir. Didi Ramyadi, MM

NIP. 19640710 199301 1 001

DAFTAR PEMETAAN NOMENKALTUR PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Renja Perangkat Daerah			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019						Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan		Kegiatan		Program		
Kode SIMRAL	Nomenklatur	Indikator Program/Kegiatan	Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)	11
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
URUSAN : NON URUSAN (GENERIK)									
0000.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit							
06.001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan BMD	Administrasi Keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
0:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
01.015	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air Telepon dan Internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air Telepon dan Internet	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.013	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang tertata							Diusulkan apabila dilaksanakan setiap OPD
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar/ diperpanjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran							Diusulkan menjadi sub kegiatan Penyediaan Gaji

01.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.010	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
0:02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik							
02.009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
02.005	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
02.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
02.011	Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Jumlah peringatan hari hari besar nasional	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	tidak tersedia nomenklatur yang sesuai pada Permendagri 90-2019
02.012	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan taman makam pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Urusan Generik
0:03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur							
03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
0:05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1) Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2) Rata-rata nilai SKP							
05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi							Diusulkan apabila dilaksanakan
05.024	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian							Diusulkan apabila dilaksanakan setiap OPD

05.001	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai kinerja SKP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	
URUSAN : SOSIAL									
Sub Urusan : Pemberdayaan Sosial									
0106.30	Program Pemberdayaan Sosial	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial							
30,009	Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan	Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan,	
30,003	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda vetaran penerima santunan							tidak tersedia nomenklatur yang sesuai pada Permendagri 90-2019
30,004	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah peserta seminar tentang nilai-nilai kejuangan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial							tidak tersedia nomenklatur yang sesuai pada Permendagri 90-2019
30,005	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai	
			Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Asuhan AR- RAYAN Kel. Timbau	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai	

			Pengadaan kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Asuhan Marhamah RT.8Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai	
			Fasilitas Pemberdayaan LKSA (Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Swasta) Di Kab. Kukar	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai	
			Pengadaan kelengkapan dan penunjang fasilitas Panti Asuhan Misbahun Munir Ke. Melayu Kec. Tenggarong	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai	
			Pengadaan kelengkapan dan penunjang fasilitas Panti Asuhan Misbahun Munir Ke. Melayu Kec. Tenggarong	Jumlah LKSA yang memperoleh bantuan dibagi jumlah LKSA yang terdaftar	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai	
30,007	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	Jumlah Lembaga yang menerima pembinaan PUB dan UGB	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Lembaga yang menerima pembinaan PUB dan UGB	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	
30,008	Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan	Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitas pengembangan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitas pengembangan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	

			Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan (Capacity Building) dan Bantuan Sarana Prasarana pada Yayasan Sekata cabang Kutai Kartanegara	Jumlah PKSK Kelembagaan yang memperoleh Fasilitasi pengembangan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai		
Sub urusan : Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan										
0106.19	Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial								
19,001	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana panti sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
			Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Fasilitas Panti Sosial asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana panti sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
Sub Urusan : Rehabilitasi Sosial										
0106.27	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial								
27,001	Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
27,002	Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
				Fasilitasi alat bantu Akseibilitas bagi lanjut Usia Non Potensial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
27,004	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
2	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru.)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
				Fasilitasi alat bantu Akseibilitas bagi Penyandang Disabilitas (dan Eks Penyakit Kronis - Kusta)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
27,006	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		

27,007	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,008	Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,009	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,010	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,011	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,012	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif)	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,013	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,014	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
27,015	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
0106.28	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						
28,010	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri	Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ketrampilan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ketrampilan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	masih dalam tahap konsultasi dengan Kemntrian Sosial terkait nomenkatur yang sesuai dengan kegiatan

28,011	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ketrampilan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan,	masih dalam tahap konsultasi dengan Kemntrian Sosial terkait nomenkaltur yang sesuai dengan kegiatan
28,012	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial	jumlah petugas puskesmas yang memperoleh bimbingan tehknis	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah petugas puskesmas yang memperoleh bimbingan tehknis	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan,	
28,001	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ketrampilan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan	masih dalam tahap konsultasi dengan Kemntrian Sosial terkait nomenkaltur yang sesuai dengan kegiatan
28,002	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Pendamping BPNT (TKSK) yang memperoleh fasilitasi pendampingan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS perorangan yang memperoleh pembinaan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	
28,004	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Operasional puskesmas kel)	Jumlah Petugas Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Penduduk Miskin yang terdata dalam BDT	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial	
28,005	Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (musrenbang)	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Penduduk Miskin yang terdata dalam BDT	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
28,006	Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	jumlah Kesepakatan dengan pihak ketiga	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah Kesepakatan dengan pihak ketiga	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	
28,007	Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	

28,008	Operasional Puskesmas Kelurahan	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Penduduk Miskin yang terdata dalam BDT	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3) Prosentase Veteran dan Janda veteran yang menerima Santunan 4) Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	
Sub Urusan : Perlindungan dan Jaminan Sosial									
0106.29	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial							
29,001	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
29,002	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
29,002	Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ktrampilan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	masih dalam tahap konsultasi dengan Kemntrian Sosial terkait nomenklatur yang sesuai dengan kegiatan
29,004	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
			Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
29,005	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas TAGANA	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas TAGANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana kabupaten/ Kota	2) Persentase Masyarakat yang memperoleh pengetahuan kesiap siagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
29,006	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana kabupaten/ Kota	2) Persentase Masyarakat yang memperoleh pengetahuan kesiap siagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat 2) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial

Ir. Didi Ramyadi, MM
NIP. 19640710 199301 1 001

Daftar Kegiatan yang belum masuk dalam Renja tetapi tersedia dalam Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019

1	Fasilitasi Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Jumlah keluarga dengan anak bermasalah sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi psikososial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang Memperoleh Bimbingan Psikososial	Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Presentase Keluarga yang memperoleh Bantuan rehabilitasi sosial dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	diusulkan masuk dalam renstra 2022
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	jumlah sarana dan prasarana TMP yang di rehabilitasi	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dijaga	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan taman makam pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	
3	Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Kerjasama	Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ Aids dan Napza di Luar	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1) Persentase Laporan PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	
4	Fasilitasi Pengembangan LK3	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi	Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan LK3	Jumlah SDM LK3	Pengembangan PSKS Kabupaten/Kota	2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	

Daftar Kegiatan yang terdapat di Renja namun belum tersedia dalam Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019

1	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri	Jumlah KK yang memperoleh pelatihan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi Produktif							
2	Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi Produktif							
3	Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi Produktif							
4	Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan dan bantuan usaha ekonomi Produktif							
5	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda vetaran penerima santunan	Urusan Pemerintah Pusat						
6	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah peserta seminar tentang nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Urusan Pemerintah pusat						